

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALI KAN
KELURAHAN LOA BAKUNG KECAMATAN SUNGAI KUNJANG

No.	Informasi {berisi informasi tertentu yang dikecualikan)	Dasar Hukum Pengeeualian Informasi	Konsekuensi/ Pertimbangan Bagi Publik (Berisi Uraian Konsekuensi Pertimbangannya)		Jangka Waktu
			Dibuka	Ditutup	
Sekretariat					
1.	Perjanjian Kerja Sama antara Kelurahan dengan pihak ketiga	JU KIP Pasal 17 huruf ; KUH Perdata Pasal 1320 dan 1338	Melanggar isi kesepakatan terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Memenuhi klausula perjanjian terkait kerahasiaan dokumen para pihak	Sampai selesai masa pelaksanaan kontrak
2.	Informnasi hasil rapat Kelurahan Loa Bakung Yang bersifat tertutup, meliputi : - ulasan singkat - Catatan rapat, Risalah Slide presentasi dan /atau rekaman, tran skrip suara/ pembicaraan, dan keputu san rapat tertutu p yang rahasia	Pasal 1 7 h uruf i UU to. 1 4 Tahun 2008 tentang KIP Pasal 44 ayat (1) dan (2) UU No. 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan	Dapat mengganggu proses penyusunan kebijakan	Mengamankan proses pennyusunan kebijakan	Selama belum ada tindak lanjut penqolah surat
3.	Dokumen pertanggung jawaban keuangan termasuk buku rawan dan buku pembantu lainnya, SPJ Keuangan (contoh : SPP, SPM dan SP2D)	Pasal 17 huruf j UU No. 14 008 tentang KIP - Pasal 44 ayat (1) dan (2) dan pasal 66 ayat 3 huruf h UU No. 43Tahun 2009 tentang Kearsipan . UU No. 15 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara	Dapat menimbulkan penyalahgunaan dokumen negara	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen negara	20 Tahun

		- UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara			
4.	Biodata elektronik & non elektronik PNS (database) Daftar penilaian Prestasi kerja ASN, hukdis pegawai	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Mengungkapkan data pribadi yang bersifat rahasia	Melindungi data pribadi	30 Tahun
5.	Daftar Kepegawaian berupa data Pribadi	Pengaturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pelembagaan Klasifikasi Informasi Publik Pasal 11 Ayat 1 (satu), Ayat 2 (dua), dan Ayat 3 (tiga) huruf a dan huruf b.	Data tersebut dapat mengungkap rahasia pribadi yang dapat disalahgunakan pemanfaatannya oleh publik.	Melindungi data pribadi dan bersifat rahasia	Tidak Terbatas
Pemerintahan, Ketenraman dan ketertiban Umum					
1	Proses penyelesaian sengketa/ proses hukum	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum

2	Data Surat Keterangan Ahli Waris	Pasal 17 huruf h UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak tertentu	Melindungi data pribadi yang bersifat rahasia	Tidak terbatas sampai ada persetujuan <i>dari</i> yang bersangkutan
3	Data-data dalam Surat Tanah berupa : Foto Surat tanah, Letak/ posisi tanah, Nomor Surat Tanah / Nomor an Surat Tanah serta Saksi Batas Perbatasan tanah.	Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang / Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Penyelesaian Kasus Pertanahan	Informasi yang apabila dipublikasikan dapat mengganggu perekonomian daerah	Melindungi dan mengurangi penyalahgunaan dokumen pertanahan	30 Tahun
4	Data Pribadi Kependudukan	Pasal 17 UU No. 14 Tahun 2008, UU No. 14 Tahun 2008, Pasal 17 tahun 2008; UU No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 84 ayat(1) dan pasal 85 ayat(1),(2) dan (3), pasal 80; UU No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi	Mengungkap data pribadi yang bersifat rahasia	informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.	30 Tahun
Kesra dan Pemberdayaan Masyarakat					
1	Data penduduk dalam Proses Relas/ poses hukum pidana/	Pasal 17 huruf a UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP	Menghambat proses penyelesaian sengketa / penegakan hukum	Kelancaran proses penyelesaian sengketa/ penegakan hukum	Sampai dibuka melalui pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum
2	Data Kasus Kekerasan Perempuan dan Anak	UU No 11 Tahun 2012 Pasal 19	telah diatur dalam undang-undang	telah diatur dalam undang- undang	Sampai dibuka melalui Pengadilan dalam persidangan yang terbuka untuk umum